

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Anggito, A., dan J. Setiawan. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Jakarta: CV Jejak Publisher, 2018.
- Asikin, Zainal. *Pengantar Hukum Perdata Nasional*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2018.
- Ayu, Retno Wulan. *Perlindungan Hukum terhadap Anak dalam Perspektif Hukum Perdata dan Hukum Islam*. Jakarta: Prenadamedia Group, 2021.
- Buku Panduan Penulisan Tesis 2025* (Semarang: Program Studi Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro, 2025).
- Candra, Mardi. *Aspek Perlindungan Anak di Indonesia*. Jakarta: Kencana, Prenadamedia Group, 2018.
- Darusman, Y. *Hukum Perdata dalam Dinamika Sosial*. Bandung: Refika Aditama, 2016.
- Donardono, Donny. *Wacana Pembaharuan Hukum di Indonesia*. Jakarta: Perkumpulan untuk Pembaharuan Hukum Berbasis Masyarakat dan Ekologis (HuMa), 2007.
- Hadjon, Philipus M. *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*. Surabaya: Bina Ilmu, 1987.
- Hadrian, Endang dan Lukman Hakim. *Hukum Acara Perdata Indonesia: Permasalahan Eksekusi dan Mediasi*. Yogyakarta: Deepublish., 2020.
- Harahap, Yahya. *Segi-Segi Hukum Perjanjian: Teori dan Praktik*. Bandung: Alumni, 2015.
- HR, Ridwan. *Hukum Administrasi Negara*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2015.
- Mulyadi, Lilik. *Hukum Perdata dalam Teori dan Praktik*. Jakarta: Djambatan, 2002.
- Mamudji, Sri. *Metode Penelitian dan Penulisan Hukum*. Jakarta: Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2005.
- Mertokusumo, Sudikno. *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*. Yogyakarta: Liberty, 2007.

- _____. *Hukum Acara Perdata Indonesia*. Yogyakarta: Liberty, 2019.
- Moleong, Lexy J. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya, Cet. Ke-40. 2021.
- Marzuki, Peter Mahmud. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Kencana, 2017.
- Prawirohamidjojo, Soetojo. *Hukum Orang dan Keluarga*. Surabaya: Airlangga University Press, 1987.
- Prodjodikoro, R. Wirjono. *Hukum Perdata tentang Hak-Hak atas Benda*. Bandung: Sumur Bandung, 1991.
- Rahardjo, Satjipto. *Ilmu Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2012.
- Rawls, John. *A Theory of Justice*. Cambridge: Harvard University Press, 1971.
- Rosnidar Sembiring. *Hukum Keluarga dalam Perspektif Hukum Nasional*. Medan: USU Press, 2014.
- Saleh, Ahmad dan Malicia Evendia. *Hukum Perlindungan Anak*. Bandar Lampung: Pusaka Media, 2020.
- Setiawan, Hadi. *Hukum Perdata dalam Perspektif Modern: Kajian Teoretis dan Praktis Pengalihan Hak Milik*. Jakarta: Kencana, 2018.
- Siti Malikhatun Badriyah. *Prinsip-Prinsip Perlindungan Anak dalam Sistem Hukum Indonesia*. Semarang: UNDIP Press, 2022.
- Soeroso. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: PT Sinar Grafika, 2011.
- Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: Rineka Cipta, 1983.
- Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji. *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2009.
- Subekti, R. *Pokok-Pokok Hukum Perdata*. Jakarta: Intermasa, 2014.
- Sumardjono, Maria S.W. *Tanah dalam Perspektif Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2018.
- Sunggono, Bambang. *Metodologi Penelitian Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2018.

Syarief, Elza. *Praktik Peradilan Perdata: Teknis dan Kiat Menangani Perkara*. Jakarta: Sinar Grafika, 2021.

Waluyo, Bambang. *Penelitian Hukum dalam Praktek*. Jakarta: Sinar Grafika, 2002.

Jurnal

Adelina, Fransiska. “Celah Hukum Eksekusi Jaminan Fidusia oleh Kurator pada Masa Insolvensi.” *Majalah Hukum Nasional*, vol. 48, no. 1 (2018): 115–132.

Alwi, Shafira dkk. “Kepastian Hukum Sertipikat Hak Milik Berdasarkan Peralihan Hak Jual Beli Terkait Gugatan Ahli Waris”. *Journal of Innovative and Creativity*, vol. 5, no. 3 (2025): 24253–24272.

Arum, Sekar Puspita. “Kedudukan Akta Jual Beli Tanah Milik Anak di Bawah Umur Tanpa Adanya Izin Pengadilan.” *Unes Law Review*, vol. 6, no. 2 (2023): 4082–4089.

Dewi Astuti. “Analisis Yuridis terhadap Penyalahgunaan Dana Anak di Bawah Pengampuan.” *Jurnal Hukum Humaniora*, vol. 9, no. 1 (2019): 50–61.

Dian I. Lestari dan Akhmad Khisni. “Tinjauan Yuridis Permohonan Perwalian dalam Pengurusan Izin Jual Harta Anak di Bawah Umur di Pengadilan Negeri Jepara.” *Prosiding Konstelasi Ilmiah Mahasiswa Unissula (KIMU)*, 7 (2022): 13–16.

Dian Puspita Sari. “Kewenangan dan Pembatasan Hak Wali dalam Perspektif Perlindungan Anak.” *Jurnal Lex Privatum*, vol. 11, no. 2 (2023): 98–111.

Deni S.B. Yuherawan. “Building a New Concept of the Purpose of Law.” *Proceedings of the 3rd International Conference on Law, Governance, and Social Justice (ICoLGaS 2023)* (2023): 1225.

Hendra Gunawan. “Tanggung Jawab Wali terhadap Pengelolaan Harta Anak di Bawah Umur Menurut Hukum Perdata.” *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, vol. 49, no. 3 (2019).

Irselin Tasik Lino. “Permohonan Perwalian Anak di Bawah Umur oleh Ibu Kandung dalam Pengelolaan Harta Warisan.” *Jurnal Ilmu Hukum: Alethea*, vol. 4, no. 2 (2021): 132–133.

Kartika Gusmawati, Esther Masri, dan Oti Handayani. “Pertanggungjawaban Wali dalam Menjalankan Kekuasaan terhadap Harta Anak di Bawah Umur Setelah Berakhirnya Perwalian.” *Jurnal Hukum Sasana*, vol. 9, no. 1 (2023).

- Karlina Karim. "Pelaksanaan Pengalihan dan Pembebanan Harta Anak di Bawah Umur Ditinjau dari Kitab Undang-Undang Hukum Perdata." *Jurnal Petitem*, vol. 1, no. 2 (2021): 154.
- Lina Marlina. "Kedudukan Wali sebagai Pengelola Aset Anak dalam Hukum Perdata Indonesia." *Jurnal Ilmu Hukum Refleksi*, vol. 8, no. 1 (2022): 33–47.
- Nanda Fitriani dan Rina Suryani. "Peranan Notaris dalam Peralihan Hak Milik atas Tanah dan Bangunan Berdasarkan Akta Jual Beli." *Jurnal Lex Renaissance*, vol. 5, no. 3 (2020): 334.
- Pratama, Arif. "Aspek Kepastian Hukum dalam Pengalihan Hak atas Benda Tidak Bergerak di Indonesia." *Jurnal Lex Renaissance*, vol. 8, no. 1 (2023): 34–47.
- Pratiwi, Yulita Dwi. "Harmonisasi Perlindungan Harta Kekayaan Anak dalam Perwalian melalui Penguatan Peran Wali Pengawas." *Jurnal Suara Hukum*, vol. 1, no. 1 (2019): 61–90.
- Premchand, L. "Social Justice and Rawls' Difference Principle", *Essex Student Journal*, vol. 9, no. 1 (2017): 1-6. doi: <https://doi.org/10.5526/esj17>.
- Rahman, Fadli. "Kekuatan Hukum Surat Pernyataan Perwalian dalam Perlindungan Anak di Bawah Umur." *Jurnal Hukum dan Pembangunan Sosial*, vol. 12, no. 2 (2021): 160–175.
- Rahmawati, Dini. "Kedudukan Akta Notaris dalam Pengalihan Hak Milik atas Tanah." *Jurnal Hukum Lex Et Societatis*, vol. 9, no. 4 (2021): 121–135.
- Rahmawati, Dwi. "Pengawasan Hukum terhadap Penggunaan Dana Ganti Rugi oleh Wali Anak di Bawah Umur." *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum*, vol. 15, no. 3 (2022): 210–225.
- Ratri Anggraini. "Pertanggungjawaban Hukum Wali terhadap Dana Kompensasi Anak Korban Kecelakaan." *Jurnal Yuridis Nasional*, vol. 12, no. 2 (2020): 80–90.
- Rika Nurhayati. "Tanggung Jawab dan Pengawasan Hukum terhadap Wali dalam Pengurusan Harta Anak di Bawah Umur." *Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora*, vol. 9, no. 2 (2021): 145–157.
- Rika Putri. "Pertanggungjawaban Hukum atas Penyalahgunaan Dana Ganti Rugi Anak di Bawah Perwalian." *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, vol. 50, no. 4 (2020): 301–315.
- Rika Saraswati. "Mendefinisikan Asas Kepentingan Terbaik Anak dan Penghargaan terhadap Hak Berpendapat Anak." *Bunga Rampai: Konferensi*

Politik, Hukum, dan Kekuasaan ke-2. Universitas Katolik Soegijapranata, 2016.

Sitorus, Dwi. “Tinjauan Hukum Pengalihan Hak Milik atas Tanah Berdasarkan KUHPdata dan Undang-Undang Pokok Agraria.” *Jurnal Hukum dan Keadilan Sosial*, vol. 10, no. 3 (2022): 112–126.

Sri Wahyuni. “Aspek Perlindungan Hukum terhadap Anak di Bawah Pengampuan.” *Jurnal Rechtsvinding*, vol. 11, no. 1 (2022).

Tafonao Ingat Riang & Butarbutar Elisabeth Nurhaini. “Pelaksanaan Tugas Balai Harta Peninggalan Kota Medan Selaku Wali Pengawas Warisan Anak.” *Jurnal Profil Hukum*, (2024).

Widodo, Aditya. “Proses Hukum Pengalihan Hak atas Tanah Berdasarkan Akta Otentik.” *Jurnal Ilmiah Notarius*, vol. 15, no. 1 (2023): 76–90.

Winda Kurniasih. “Analisis Yuridis Pembuatan Akta Otentik sebagai Bukti Peralihan Hak.” *Jurnal Ilmiah Hukum De Jure*, vol. 12, no. 1 (2022): 72.

Yolanda, Wendi. “Akibat Hukum Peralihan Hak Atas Tanah Milik Anak Tanpa Persetujuan Penetapan Perwalian Dari Pengadilan (Studi Putusan Pengadilan Negeri Malang No 217/Pdt.G/Pn.Mlg)”. *Jurnal Somasi: Sosial, Humaniora, Komunikasi*, vol. 1, no. 1. (2020): 92-97.

Yusuf Ahmad. “Sanksi Hukum bagi Wali yang Menyalahgunakan Dana Perwalian.” *Jurnal Yurisprudensi*, vol. 18, no. 2 (2023): 62–74.

Yulianti. “Peranan Wali dalam Pengelolaan Harta Anak di Bawah Umur Ditinjau dari KUHPdata.” *Jurnal Legislasi Indonesia*, vol. 17, no. 2 (2020): 145–160.

Website

Aulina, Laurences. “Hukum Perwalian”. (2020). Kennywiston.com. Diakses pada 3 Mei 2025. <https://www.kennywiston.com/hukum-perwalian/>.

Hasyim, Abdul Manan. “*Hakim Mahkamah Syariah Provinsi Aceh*”. (2018). Diunduh dari <http://www.idlo.int/DOCNews/240DOCF1.pdf>.

Lazuardi, Aulia R. “Hak Asuh Anak (Hadhanah) Dalam Perspektif Hukum Positif Dan Hukum Islam Di Indonesia”. Pa-pelaihari.go.id. (2025). Diakses pada tanggal 23 Desember 2025. <https://pa-pelaihari.go.id/kategori-artikel/1172-hak-asuh-anak-hadhanah-dalam-perspektif-hukum-positif-dan-hukum-islam-di-indonesia.html#:~:text=Undang%2DUndang%20Nomor%202023%20Tahun%202025>

[202002%20tentang%20Perlindungan%20Anak%20yang,orang%20tua%20meliputi%203%20hal.](https://misaelandpartners.com/jual-beli-jika-salah-satu-pihak-pikun/)

Misel and Partners. “Jual Beli Jika Salah Satu Pihak Demensia atau Pikun”. (2025). Diakses 15 Mei 2025. <https://misaelandpartners.com/jual-beli-jika-salah-satu-pihak-pikun/>.

SIP Lawfirm. “Syarat dan Prosedur Perwalian Anak Menurut Hukum”. (2024). Diakses 9 Mei 2025. <https://siplawfirm.id/perwalian-anak/?lang=id>.

SIP Lawfirm. “Kapan Perjanjian Dinyatakan Batal Demi Hukum?”. (2025). Diakses pada tanggal 12 November 2025. <https://siplawfirm.id/kapan-perjanjian-dinyatakan-batal-demi-hukum/?lang=id>.

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*Burgerlijk Wetboek*).

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok Agraria (UUPA).

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah.

Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2019 tentang Syarat dan Tata Cara Penunjukan Wali.

Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977 tentang Perwakafan Tanah Milik.

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021 tentang Hak Pengelolaan, Hak Atas Tanah, Satuan Rumah Susun, dan Pendaftaran Tanah.

Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah.